

25 Kader Posyandu di Kalurahan Ambarketawang Ikuti Sosialisasi Pencegahan Tuberkulosis

SLEMAN (KR) - Sebanyak 25 kader Posyandu se-Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Sleman mengikuti sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka pencegahan Tuberkulosis (TBC) dan perilaku tidak merokok di rumah tangga. Kegiatan diselenggarakan di Joglo Pawirosumarto, Jalan Godean Km 7,5 Sidomoyo Godean Sleman, Kamis (1/12). Sosialisasi menghadirkan narasumber dr Rizky Ferrian Ferdiansyah, dokter di RS Paru Respira Yogyakarta. Kegiatan dihadiri pula Sofyan Setyo Darmawan ST MEng (Anggota Komisi D DPRD DIY) dan dr Ni Made Erna (Kepala Seksi Pelayanan Medis RS Paru Respira) yang sekaligus mewakili dari Dinas Kesehatan DIY.

Sofyan Setyo Darmawan menuturkan, selepas pandemi, jumlah kejadian TB di masyarakat ternyata meningkat, sehingga menjadi kewaspadaan bersama. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan agar angka kejadian TB tidak meningkat adalah pengobatan pasien TB harus dilakukan secara disiplin (tidak putus) dan tuntas. Di samping itu masyarakat harus menerapkan Germas.

"Penyakit TB itu bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tuntas tanpa putus (minimal selama 6 bulan). Maka dari itu, pasien TB harus dididukasi agar disiplin mengonsumsi obat dan menjalaninya sampai tuntas, jangan berhenti di tengah jalan, meskipun badan sudah enak," kata Sofyan kepada KR di sela kegiatan.

Dijelaskan Sofyan, permasalahan akan muncul manakala pasien TB tidak menuntaskan pengobatannya. Meskipun badan sudah enak, tapi bakteri atau kuman penyebab TB di dalam tubuh belum sepenuhnya hilang dan bisa kambuh kembali. Justru pengobatan yang tidak tuntas itu akan menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat sehingga akan sulit disembuhkan.

"Maka muncul TB RO atau TB yang resisten/kebal obat yang membuat penyakit lebih sulit ditangani. Obatnya menjadi lebih banyak, efek samping juga lebih banyak dan waktu penyembuhannya lebih lama bisa sampai 2 tahun. Hal ini jangan sampai terjadi, maka pasien TB harus diberi pemahaman agar mau menuntaskan pengobatannya," ujarnya.

Di sinilah pentingnya kader Posyandu mendapat sosialisasi soal TB, agar bisa memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat secara benar. "Komisi D berkomitmen untuk mendukung kampanye Germas ke masyarakat, yang kali ini fokus pada pencegahan TB. Dukungan (DPRD DIY) itu termasuk dalam pengalokasian anggaran," kata Sofyan.

Ni Made Erna mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan terus mengencakan Germas untuk menekan angka kejadian penyakit, baik itu penyakit menular seperti TB ini dan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Selain itu mulai muncul kembali penyakit yang sebelumnya di-



Para narasumber menyampaikan sosialisasi pencegahan TB.

nyatakan sudah tidak ada lagi di Indonesia, seperti penyakit polio.

"Peran ibu-ibu kader Posyandu ini sangat penting untuk memberikan pendampingan dan berbagi informasi kesehatan yang benar kepada masyarakat sekaligus mengajak warga untuk menerapkan budaya hidup sehat," ujarnya.

Sementara itu, dalam pemaparan materinya, Dokter Rizky Ferrian Ferdiansyah menjelaskan, penyakit TB menjadi permasalahan kesehatan yang besar bagi Indonesia yang saat ini menjadi negara peringkat tiga dunia dengan kasus TB terbanyak setelah Tiongkok dan India. Selain itu TB memberikan dampak kesehatan yang cukup besar, dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup banyak serta menurunkan kualitas hidup penderitanya.

"Oleh sebab itu Germas terus disosialisasikan, seperti rutin makan buah dan sayuran serta olahraga teratur. Khusus untuk penyakit TB disarankan membuka jendela agar sirkulasi udara lancar, cahaya matahari masuk sehingga bakteri TB tidak berkembang di rumah.

Satu lagi jangan merokok di dalam rumah, karena perokok rentan terkena TB dan bisa menularkannya," ujarnya.

Salah satu strategi dalam pencegahan TB, menurut Rizky adalah "TOSS TB" singkatan dari temukan, obati, sampai, sembuh, tuberkulosis. Dengan demikian, para kader Posyandu ini setelah mengikuti sosialisasi ini, akan tahu gejala seseorang terpapar TB, seperti batuk lama, sesak nafas, berat badan turun, atau berkeringat di malam hari. "Jika menemukan pasien seperti itu segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Dan jika positif TB, maka si pasien akan segera mendapatkan pengobatan," katanya.

Menurut Rizky, penyakit TB yang telah merogoti paru-paru dan merusak sistem pernafasan dan terus bertambah parah bisa menyebabkan kematian. Bakteri TB bisa menular ke siapa saja (tua, muda) terutama orang yang imun tubuhnya sedang lemah. "Pengobatan TB secara dini akan mempercepat proses penyembuhan sehingga menekan angka penularan," pungkasnya. (Dev)



Kader Posyandu menyimak materi sosialisasi tentang pencegahan TB.



Para narasumber menyampaikan sosialisasi pencegahan TB.

JELANG PENETAPAN UMK 2023

Bupati Minta Jaga Suasana Kondusif

SLEMAN (KR) - Jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang rencana diumumkan 6 Desember nanti, Bupati Sleman Kustini siap membuka ruang kesepakatan bersama. Melalui forum Dewan Pengupahan dilakukan diskusi bersama unsur pekerja, pengusaha, instansi terkait dan akademisi.

"Kita buka ruang diskusi. Artinya semua pihak dilibatkan mulai dari buruh, pengusaha, pemerintah, termasuk para pakar. Diskusi di Dewan Pengupahan ini perlu agar kita saling memahami keadaan dari masing-masing pihak dan berujung pada kesepakatan bersama," ungkap Kustini saat dikonfirmasi, Kamis (1/12).

Menurut Bupati, dalam penetapan UMK di Sleman semua pihak harus bersepakat untuk menjaga suasana kondusif. Pasalnya, sebagai wilayah yang didominasi pariwisata dan industri, dibutuhkan kondusivitas agar semua sektor tersebut bisa

berjalan dengan baik. "Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kita semua," katanya.

Bupati juga menegaskan dan terus mengupayakan agar masyarakat di Sleman maju dan sejahtera. Namun, berbagai kebijakan yang dikeluarkan tentu diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang sedang dan akan terjadi.

"Karena sudah dua tahun kondisi negara ini tidak baik-baik saja. Mulai dari pandemi, kenaikan bahan-bahan pokok, dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, negara kita digadagadag bakal inflasi. Ten-

tunya penetapan UMK ini harus dilakukan dengan hati-hati," tegas Bupati.

Diakui Bupati, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke beberapa industri. Kunjungan itu, untuk mengetahui kondisi perekonomian industri terkini dan kondisi pekerja. Mengingat ditemukannya beberapa problem yang dihadapi industri di Sleman. Salah satunya tentang masuknya produk-produk luar negeri seiring dengan terbukanya market online. Problem ini tentu akan jadi evaluasi dan harus temukan solusi dan berikan pendampingan.

"Saya kemarin juga pesen kalau bisa jangan sampai ada pemutusan kerja atau dirumahkan karena kondisi daya beli sedang turun. Harapan saya, daya beli bisa naik, sehingga perusahaan tidak rugi dan upah buruh bisa kita naikkan," pungkaskan Bupati. (Has)-f

Pamong Deklarasi Netralitas dalam Pemilu 2024

SLEMAN (KR) - Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman mendeklarasikan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Deklarasi diadakan di Balai Desa Condongatur Depok Sleman, Rabu (30/11), dihadiri perwakilan pengurus paguyuban Pamong Kalurahan mulai Lurah, Carik, Pangripta, Danarta, Jagabaya, Ulu Ulu, Kamituwa dan Dukuh.

Dalam deklarasi itu, para pamong mendukung tetap tegaknya NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Mendukung suksesnya Pemilu Serentak tahun 2024 demi terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjaga netralitas dan profesionalitas pamong dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab. Bersinergi dengan Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Sleman.

Selain deklarasi, Pagu-



Pamong Kalurahan mendeklarasikan netralitasnya dalam Pemilu 2024.

yuban Dukuh Kabupaten Sleman 'Cokro Pamungkas' berkolaborasi dengan Polda DIY mengadakan sarasehan tentang Pemilu 2024. Sarasehan menghadirkan narasumber dari Binmas Polresta Sleman, Kesbangpol Sleman dan Bawaslu Sleman.

Lurah Condongatur Reno Candra Sangaji sangat mengapresiasi deklarasi dan sarasehan yang membahas soal netralitas Pamong Kalurahan dalam Pemilu 2024. "Setelah mendapatkan pengarahan dari narasumber, diharapkan Pamong Kalurahan betul-

betul bisa netral dalam Pemilu 2024, dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan yang ada," katanya.

Sementara Wakil Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sukarjo mengatakan, pilihan masyarakat dalam Pemilu 2024 sangat berbeda-beda. Sebagai Pamong musti bisa 'momong' seluruh potensi yang ada di masyarakatnya. "Ya kalau sudah menyinggung soal pilihan atau dukungan mendukung calon atau partai politik, Pamong harus membatasi diri dan harus netral," katanya. (Dev)-f

LAPORAN PANSUS III TENTANG PENGELOLAAN BMD

Pengoptimalan Aset Mangkrak, Ducting dan BLUD

SLEMAN (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Sleman mendekati final. Pembahasan Panitia Khusus (pansus) III terkait draf raperda tersebut telah menuntaskan amanahnya dan melaporkannya dalam sidang paripurna. Harapannya raperda ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum, efektif dan derian dalam pengelolaan BMD.

Ketua Pansus III Raperda BMD Sumaryatin mengatakan, Pansus III memandang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi prioritas untuk segera ditetapkan. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman.

"Kami sudah menyepakati raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dilanjutkan proses pembahasan ke tahapan selanjutnya. Supaya raperda segera ditetapkan sehingga dalam pengelolaan barang milik daerah ada kepastian hukumnya," kata Sumaryatin atau yang kerap dipanggil Atin ini, Kamis (1/12).

Tujuan dari raperda ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Selain itu untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif dan ekonomis. "Kami ingin dalam pengelolaan BMD tertib administrasi dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi," terangnya.

Dalam raperda ini juga mengatur tentang pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan BMD, sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS) dan Bangunan Serah Guna (BSG). Selain itu juga mengatur tentang penilaian BMD,



Sumaryatin

pemindahtanganan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, pemusnahan dan lainnya. "Mekanisme pengelolaan BMD, hingga pemusnahan sudah diatur dalam raperda ini. Supaya dalam pengelolaannya lebih efektif dan transparan," tuturnya.

Meskipun demikian, pansus juga memberikan beberapa catatan. Di antaranya perlu ditambahkan Bab Khusus terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pansus juga menyepakati ditambahkan ayat pada pasal 31 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai payung hukum agar Badan Hukum/ Desa/ SAR & Rescue/ Koperasi/ UMKM dapat secara aktif mengajukan hibah. "Kami menilai masih ada beberapa yang perlu ditambahkan dalam raperda ini. Bahkan sudah ada yang disepakati untuk dimasukkan dalam pasal," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah harus mengakomodasi langkah-langkah yang komprehensif ter-

kait penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang mangkrak. Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS itu menilai, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah tentang hal ini. "Terlebih, cukup banyak aset milik daerah yang belum optimal pemanfaatannya, semisal Taman Kuliner Condongatur, Pasar Prambanan, Pasar Sleman, dan Pasar Deggung," katanya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ini ditambahkan unsur pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati. "Pansus sepakat pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan insentif dan tunjangan. Selain itu juga ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dalam pengelolaan barang milik daerah, baik besaran ganti rugi maupun sanksi pidananya," tambahnya.

Poin penting lainnya, Bupati perlu membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah yang melibatkan tenaga ahli, akademisi dan pihak-pihak yang berkompeten yang bertugas melaksanakan penghapusan barang milik daerah. Untuk tahap implementasinya, perlu diterbitkan Peraturan Bupati terkait teknis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penerbitan Peraturan Bupati maksimal 6 bulan setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Raperda ini juga mengakomodasi langkah-langkah yang komprehensif terkait penataan kabel fiber optic dengan menyediakan saluran (ducting) di bawah tanah di sepanjang ruas jalan di Kabupaten Sleman sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menata kota dan meningkatkan pendapatan asli daerah," pungkasnya. (Sni)-f



Sumaryatin memimpin rapat Pansus III dengan mitra kerja.



Pansus III studi banding ke Salatiga.

ASTRA DAIHATSU member of ASTRA

DAIHATSU Daihatsu Sahabattu

DAIFEST 2022

DAIHATSU END YEAR FESTIVAL 2022

#SerunyaBeliDaihatsu

PERIODE 1 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2022

KAPAN LAGI BELI MOBIL BISA DAPAT MOTOR DAN MOBIL

UNDIAN BERTAHAPAN

IZIN UNDIAN: 1000/5.5/PI.02/11/2022

GRAND PRIZE 1 UNIT MOBIL ROCKY

UNDIAN BULANAN 16 UNIT SEPEDA MOTOR (UNDIAN 8 UNIT/BULAN)

DAPATKAN PROMO SPESIAL AKHIR TAHUN

SPECIAL DISKON	SALDO ASTRAPAY s/d 2 Jt*	CASHBACK TRADE IN s/d 5 Jt*
SUBSIDI DP s/d 8 Jt*	FREE ASURANSI TLO*	FREE OLI & SPARE PARTS*

Info lebih lanjut hubungi wiraniaga Daihatsu atau kunjungi Outlet terdekat di kota Anda

daicast DAIHATSU KE DAISY DAIHATSU ACCESS